

## **BAB II**

### **DINAMIKA KOTA BANDUNG DAN SUWON**

Kota Bandung dan Kota Suwon merupakan objek yang diteliti pada penulisan tesis ini. Oleh karena itu, pada bab 2 (dua) ini penulis bermaksud menggambarkan bagaimana kondisi Kota Bandung dan Kota Suwon dimulai dari sejarah, pemerintahan, keadaan geografis, pertumbuhan demografi, perekonomian, pendidikan, dan kebudayaannya.

#### **A. Dinamika Sistem Politik Kota Bandung**

Data yang diperlukan untuk menunjang dan melengkapi penelitian tesis ini adalah gambaran Kota Bandung itu sendiri, berikut ini adalah gambaran Kota Bandung.

##### **1. Pemerintahan Kota Bandung**

Landasan pembentukan Pemerintah Daerah di Indonesia pada dasarnya semenjak tahun 1945 dibentuk atas dasar UUD 1945 pasal 28. Sebagai dasar realisasi dari pasal tersebut maka semenjak itu UU yang telah mengatur Pemerintah Kota Bandung secara berturut-turut adalah sebagai berikut :

- a. UU No. 1 tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah
- b. UU No. 52 tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah
- c. UU No. 44 tahun 1950 tentang Undang-undang atau Pengaturan Pokok Pemerintah Daerah
- d. UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah
- e. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1956 tentang Pemerintah Daerah
- f. UU No. 9 tahun 1965 tentang Desa Praja Daerah
- g. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah

Adapun tugas pokok Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah Walikota Bandung

- b. Tugas pokok Pemerintah Kota Bandung adalah melaksanakan tugas yang telah menjadikan kuasa dan kewenangannya yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah dan Pembangunan yang secara garis besar diproyeksikan dalam APBD.

Dalam administrasi pemerintah daerah, kota Bandung dipimpin oleh wali kota. Sejak 2008, penduduk kota ini langsung memilih wali kota beserta wakilnya dalam pilkada, sedangkan sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD kotanya. Sesuai konstitusi yang berlaku DPRD Kota Bandung merupakan representasi dari perwakilan rakyat. Pada Pemilu Legislatif 2014 anggota DPRD kota Bandung adalah 50 orang, yang kemudian tersusun atas perwakilan sembilan partai.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban Pimpinan Pemerintah, yaitu menyusun dan membentuk satuan organisasi daerah dan dinas-dinas kedalam bentuk sekretariat daerah yang diharapkan dapat mendukung peranan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokoknya. Pembentukan dan penyusunan satuan organisasi harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

Satuan organisasi tersebut terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan
  - 1) Walikota
  - 2) Wakil beserta DPRD
- b. Unsur Staff
  - 1) Sekretariat Daerah
  - 2) Bp-7
  - 3) Bappeda
  - 4) Inspektorat Daerah
- c. Unsur Pelaksana
  - 1) Dinas
  - 2) Bagian
  - 3) Kantor

Pemerintah Daerah Kota Bandung melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang secara garis besar diproyeksikan ke dalam APBD, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bandung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandung) diambil tanggal 08/02/2016 jam 13.10.

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau disebut dengan Otonomi Daerah.

Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan agar tujuan tercapai, dengan perhatian khusus dengan perhitungan yang seksama secara tepat dan akurat.<sup>2</sup> Serta diperlukan visi dan misi sebagai pedoman untuk Kota Bandung.

a. Visi Kota Bandung<sup>3</sup>

“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.”

Berikut ini adalah penjabaran visi dari Kota Bandung :

- 1) Bandung : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.
- 2) Unggul : menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung.
- 3) Nyaman : terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.
- 4) Sejahtera : lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat , agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan

---

<sup>2</sup> Akbarizal AB. “Kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan Kerjasama Sister City dengan Kota Braunchweig Tahun 2000-2012. (Skripsi UNIKOM, Bandung, 2013).

<sup>3</sup>

<http://bandung.go.id/rwd/index.php?fa=pemerintah.detail&id=1&token=0320980567d283a33dbc8d18f696a106> (24/06/2015 PKL 5.28)

sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

b. Misi Kota Bandung<sup>4</sup>

- 1) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
- 2) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani
- 3) Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing
- 4) Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Berikut adalah penjabaran Misi Kota Bandung :

- 1) Misi pertama : mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Bandung melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- 2) Misi kedua : menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

birokrasi pemerintah Kota Bandung yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

- 3) Misi Ketiga : membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kota Bandung yang sehat, cerdas, dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya.
- 4) Misi keempat : membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, Meningkatkan ketahanan pangan. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu

## **2. Pertumbuhan Demografi Kota Bandung**

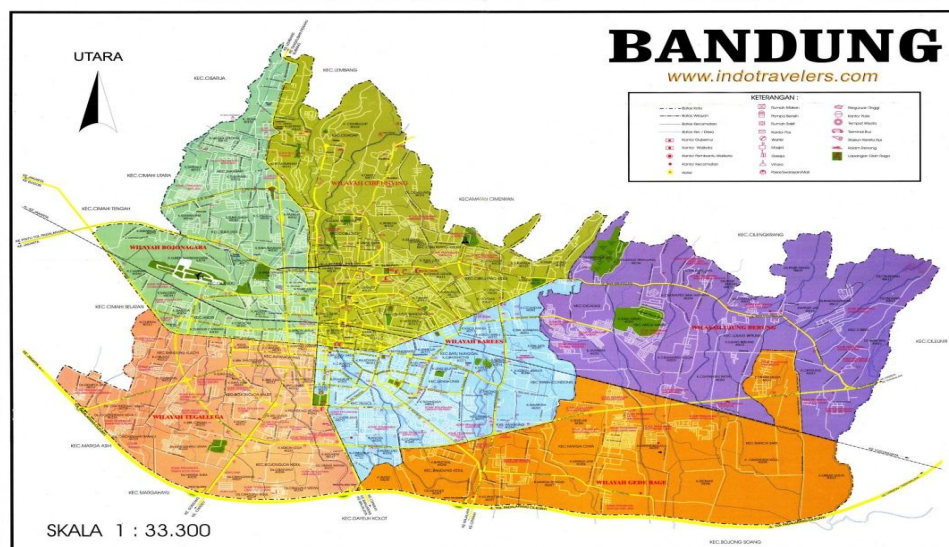
Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat dan didukung dengan kualitas SDM yang tinggi diharapkan dapat menciptakan akselerasi guna tercapainya kondisi ideal dari pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan penduduk di Kota Bandung selama ini menunjukkan peningkatan dan ini dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2011 yang sebanyak 2.424.957 jiwa, meningkat menjadi sebanyak 2.455.517 pada tahun 2012, sehingga Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Bandung pada tahun

2012 mencapai 1,26%.<sup>5</sup> lalu pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 2.483.977 jiwa penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya kota Bandung mengalami pertumbuhan penduduk.<sup>6</sup>

### 3. Keadaan Geografis Kota Bandung

Secara geografis, Kota Bandung terletak pada koordinat 107° 36' Bujur Timur dan 6° 55' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 16.767 hektar. Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, dengan sungai utamanya yaitu Sungai Cikapundung yang mengalir ke arah selatan dan bermuara ke Sungai Citarum. Sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, Bandung mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah di sekitarnya karena berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional. Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan utama di Pulau Jawa, yaitu:

- 1) Barat –Timur, pada posisi ini Kota Bandung menjadi poros tengah yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi Banten dan Jawa Tengah.
- 2) Utara –Selatan, selain menjadi penghubung utama ibukota negara dengan wilayah selatan, juga menjadi lokasi titik temu antara daerah penghasil perkebunan, peternakan, dan perikanan.



**Gambar 2. 1. Peta Geografis Kota Bandung<sup>7</sup>**

<sup>5</sup> Akbarizal AB. “Kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan Kerjasama Sister City dengan Kota Braunchweig Tahun 2000-2012. (Skripsi UNIKOM, Bandung, 2013).

<sup>6</sup> <http://pusdalisbang.jabarprov.go.id/pusdalisbang/data-94-Kependudukan.html> diakses pada tanggal 16/03/2016 pukul 20.40.

Posisi strategis Kota Bandung juga terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dimana Kota Bandung ditetapkan dalam sistem perkotaan nasional sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Selain itu, Kota Bandung juga ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Cekungan Bandung, yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis nasional.<sup>8</sup>

Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan. Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu. Iklim Kota Bandung secara umum adalah sejuk dengan kelembapan tinggi karena dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya dan curah hujan yang masih cukup tinggi. Namun, beberapa tahun terakhir kondisi suhu rata-rata udara Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan sumber polutan dan dampak dari perubahan iklim serta pemanasan global (Global Warming).

Kota Bandung dapat dikatakan sebagai kota kreatif dimana aktivitas kulturalnya dapat menyatu dengan aktivitas ekonomi dan sosial. Dengan semakin berkembangnya komunitas kreatif juga diharapkan dapat menjadi pendorong lebih lanjut akan sinergisitas perkembangan aktivitas ekonomi kreatif lokal. Ekonomi kreatif yang mencakup industri kreatif merupakan dinamika perekonomian yang berkembang saat ini di Kota Bandung. Ekonomi kreatif yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi nasional ataupun daerah untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global. Berkembangnya industri kreatif di Kota Bandung menjadi faktor yang

---

<sup>7</sup>[https://www.google.com/search?q=gambar+peta+kota+bandung&tbm=isch&imgil=tW1zn0nwDdmD2M%253A%253BecLE97pwKxQtUM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.indotravelers.com%25252Fbandung%25252Fpeta\\_bdg.html&source=iu&pf=m&fir=tW1zn0nwDdmD2M%253A%252CecLE97pwKxQtUM%252C\\_&usg=\\_\\_8iR1Un5R9YRki07EW7V20Woco4A%3D&biw=1024&bih=489&ved=0ahUKEwiuvP\\_u5jMAhXEK6YKHfsyC6MQyjcIMA&ei=s\\_gUV-6YLSmAX75ayYCg](https://www.google.com/search?q=gambar+peta+kota+bandung&tbm=isch&imgil=tW1zn0nwDdmD2M%253A%253BecLE97pwKxQtUM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.indotravelers.com%25252Fbandung%25252Fpeta_bdg.html&source=iu&pf=m&fir=tW1zn0nwDdmD2M%253A%252CecLE97pwKxQtUM%252C_&usg=__8iR1Un5R9YRki07EW7V20Woco4A%3D&biw=1024&bih=489&ved=0ahUKEwiuvP_u5jMAhXEK6YKHfsyC6MQyjcIMA&ei=s_gUV-6YLSmAX75ayYCg)

<sup>8</sup> LKPJ Kota Bandung 2012”, dalam

[http://bandung.go.id/images/download/LKPJ/LKPJ\\_2012\\_bab\\_1.pdf](http://bandung.go.id/images/download/LKPJ/LKPJ_2012_bab_1.pdf)

memperkuat sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa dan sektor industri pengolahan (tertentu) sebagai potensi unggulan daerah di Kota Bandung.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi Unggulan Daerah di Kota Bandung diilustrasikan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan pola konsumsi dan kemampuan atau kapasitas lapangan usaha dalam periode tahun berjalan, yang dihitung berdasarkan kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB terhadap nilai PDRB. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah dan menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah.

Sejak pertengahan abad ke-19, Kota Bandung terkenal sebagai Kota Pendidikan. Orang Belanda menyebutkan sebagai kota pusat intelektual, khazanah keilmuan yang konon sudah tumbuh pesat semenjak pemerintahan Hindia Belanda. Dari sini tumbuh pesat tempat-tempat pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Tinggi. Pada tahun 1879 didirikan sekolah untuk komunitas guru-guru pada tahun 1884 mulai didirikan sekolah untuk persiapan Pamong Praja atau dalam Bahasa Belanda *Opleiding School Indlansche Ambtenaren*. Kota Bandung senantiasa menjadi pusat untuk menumbuhkan spirit pendidikan baik di tingkatan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tak kalah pentingnya pula pada akhir abad ke-19 semakin banyak sekolah-sekolah yang didirikan untuk menampung dan memberikan proses sarana-prasarana antara lain Sekolah Belanda HIS, Sekolah Dasar Eropa ELS, Sekolah Menengah Mulo, Sekolah Menengah Atas AMS, dan Sekolah Lanjutan HBS, dan Sekolah Swasta lainnya. Puncak dari tumbuhnya sekolah-sekolah tersebut adalah Sekolah Tinggi *Technische Hoogeschool* yang jatuh pada tanggal 3 Juli 1920, yang kemudian sekolah ini lebih dikenal dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).<sup>9</sup>

Merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pendidikan Nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

---

<sup>9</sup> Bandung.go.id



dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-undang ini dijadikan sebagai tujuan Pendidikan Nasional Indonesia dan juga tujuan pendidikan di Kota Bandung.

Kota Bandung adalah kota yang multietnik walaupun demikian Kebudayaan Sunda masih memegang peranan dalam hidup keseharian, baik masyarakat Sunda maupun etnik pendatang menggunakan bahasa Sunda atau Indonesia sebagai bahasa komunikasi sehari-hari.

Menurut Ajip Rosidi Kebudayaan Sunda merupakan manifestasi gagasan dan pikiran, serta kegiatan baik yang abstrak maupun berbentuk benda yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang tinggal di daerah Priangan dan menamakan dirinya orang Sunda. Kebudayaan Sunda termasuk salah satu kebudayaan suku bangsa di Indonesia yang berusia tua. Bahkan, dibandingkan dengan kebudayaan Jawa sekalipun, kebudayaan Sunda sebenarnya termasuk kebudayaan yang berusia relatif lebih tua, setidaknya dalam hal pengenalan terhadap budaya tulis.

#### **4. Dinamika Ekonomi Kota Bandung**

Kota Bandung dapat dikatakan sebagai kota kreatif dimana aktivitas kulturalnya dapat menyatu dengan aktivitas ekonomi dan sosial. Dengan semakin berkembangnya komunitas kreatif juga diharapkan dapat menjadi pendorong lebih lanjut akan sinergisitas perkembangan aktivitas ekonomi kreatif lokal. Ekonomi kreatif yang mencakup industri kreatif merupakan dinamika perekonomian yang berkembang saat ini di Kota Bandung. Ekonomi kreatif yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi nasional ataupun daerah untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global. Berkembangnya industri kreatif di Kota Bandung menjadi faktor yang memperkuat sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa dan sektor industri pengolahan (tertentu) sebagai potensi unggulan daerah di Kota Bandung.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi Unggulan Daerah di Kota Bandung diilustrasikan melalui Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) yang menggambarkan pola konsumsi dan kemampuan atau kapasitas lapangan usaha dalam periode tahun berjalan, yang dihitung berdasarkan kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB terhadap nilai PDRB. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah dan menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan LPE secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Kontribusi paling tinggi terhadap PDRB Kota Bandung tahun 2009 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu 38,92% berdasar harga konstan dan 40,96% berdasar harga berlaku. Kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan berdasar harga konstan 26,66 dan berdasar harga berlaku 24,49%. Berkembangnya industri kreatif di Kota Bandung menjadi faktor yang memperkuat sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai potensi unggulan daerah di Kota Bandung.

Sektor pariwisata juga merupakan andalan sektor jasa Kota Bandung yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, membangkitkan kunjungan wisatawan, membangkitkan pertumbuhan sektor pembangunan lainnya, serta menghidupkan kembali seni dan budaya tradisional Bandung. Bandung sebagai kota kreatif merupakan potensi daya tarik wisata yang tinggi. Dalam lingkup nasional, Kota Bandung ditetapkan sebagai destinasi sekunder. Berada di tempat ke-empat, di bawah Jakarta dan Bali sebagai destinasi primer di Indonesia, dan destinasi Borobudur-Yogya-Solo. Semenjak tahun 2011, Kota Bandung telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Jawa Barat (KPPN Bandung Kota dan sekitarnya) dan merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN Bandung–Ciwidey dan sekitarnya).

## **5. Kondisi Pendidikan Kota Bandung**

Kota Bandung sejak pertengahan abad ke-19, terkenal sebagai Kota Pendidikan. Orang Belanda menyebutkan sebagai kota pusat intelektual, khazanah keilmuan yang sudah tumbuh pesat semenjak pemerintahan Hindia Belanda. Dari sini tumbuh pesat tempat-tempat pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-

Kanak sampai Sekolah Tinggi. Pada tahun 1884 mulai didirikan sekolah untuk komunitas guru-guru pada tahun 1879 didirikan sekolah sebagai upaya persiapan Pamong Praja atau dalam Bahasa Belanda *Opleiding School Indlansche Ambtenaren*.

Kota Bandung senantiasa menjadi pusat untuk menumbuhkan spirit pendidikan baik di tingkatan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tak kalah pentingnya pula pada akhir abad ke-19 semakin banyak sekolah-sekolah yang didirikan untuk menampung dan memberikan proses sarana–prasarana antara lain Sekolah Belanda HIS, Sekolah Dasar Eropa ELS, Sekolah Menengah Mulo, Sekolah Menengah Atas AMS, dan Sekolah Lanjutan HBS, dan Sekolah Swasta lainnya. Puncak dari tumbuhnya sekolah-sekolah tersebut adalah Sekolah Tinggi *Technishe Hoogeschool* yang jatuh pada tanggal 3 Juli 1920, yang kemudian sekolah ini lebih dikenal dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).<sup>10</sup>

Merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pendidikan Nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-undang ini dijadikan sebagai tujuan Pendidikan Nasional Indonesia dan juga tujuan pendidikan di Kota Bandung.

Jenjang pendidikan di Kota Bandung merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 Bab VI pasal 16 yaitu jenjang pendidikan di Indonesia meliputi tiga jenjang, yaitu:

- 1) Pendidikan Dasar. Pendidikan Dasar yang melandasi jenjang pendidikan menengah Pemerintah mewajibkan wajib belajar 9 tahun dan setiap warga negara yang berusia 7 tahun wajib mengikuti belajar tanpa dipungut biaya. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD)

---

<sup>10</sup> “Bandung Termasuk Kota Pendidikan, Sejauh Mana Sekarang ini Perkembangan Dunia Pendidikan Di Bandung Masa Lalu, Mulai Dari TK Sampai Perguruan Tinggi?” dalam [http://bandung.go.id/images/download/Bandung\\_Termasuk\\_Kota\\_Pendidikan.doc](http://bandung.go.id/images/download/Bandung_Termasuk_Kota_Pendidikan.doc), diakses pada 16 Februari 2016

dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang Sederajat selama 6 tahun; dan sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat selama 3 tahun.

- 2) Pendidikan Menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas: Pendidikan menengah umum, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), atau bentuk lain yang sederajat; dan Pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat, selama 3 tahun.
- 3) Pendidikan Tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma (2-4 tahun); sarjana (4 tahun atau lebih); magister, spesialis, dan doktor (2 tahun atau lebih); yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

## **6. Kebudayaan Di Kota Bandung**

Kota Bandung adalah kota yang multietnik walaupun demikian Kebudayaan Sunda masih memegang peranan dalam hidup keseharian. Menurut Ajip Rosidi Kebudayaan Sunda merupakan manifestasi gagasan dan pikiran, serta kegiatan baik yang abstrak maupun berbentuk benda yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang tinggal di daerah Priangan dan menamakan dirinya orang Sunda.

Kebudayaan Sunda termasuk salah satu kebudayaan suku bangsa di Indonesia yang berusia tua. Bahkan, dibandingkan dengan kebudayaan Jawa sekalipun, kebudayaan Sunda sebenarnya termasuk kebudayaan yang berusia relatif lebih tua, setidaknya dalam hal pengenalan terhadap budaya tulis. "Kegemilangan" kebudayaan Sunda di masa lalu, khususnya semasa Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Sunda, dalam perkembangannya kemudian seringkali dijadikan acuan dalam memetakan apa yang dinamakan kebudayaan Sunda. Kebudayaan Sunda yang ideal pun kemudian sering dikaitkan sebagai kebudayaan raja-raja Sunda atau tokoh yang diidentikkan dengan raja Sunda. Dalam kaitan ini, jadilah sosok Prabu Siliwangi dijadikan sebagai tokoh panutan dan kebanggaan

urang Sunda karena dimitoskan sebagai raja Sunda yang berhasil, sekaligus mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

Bila ingat Sunda maka orang akan ingat Bandung. Bandung juga sebagai ibu kota propinsi Jawa Barat menjadi pusat segala aktivitas, antara lain pendidikan, perdagangan, ekonomi, dan pemerintahan. Bandung mempunyai potensi wisata yang besar seperti wisata Bandung Tempo Doeloe dengan motto pariwisatanya “Jangan datang ke Bandung, bila kau tinggalkan istrimu di rumah”. Bandung juga memiliki potensi dalam kesenian seperti adanya beberapa paguyuban seni tradisional seperti Wayang Golek dan Karawitan, serta memiliki perguruan tinggi yang menjalankan pendidikan di bidang seni seperti ASTI (Akademi Seni Tari Indonesia) Bandung, STSI (Sekolah Tinggi Seni Indonesia), SMKI (Sekolah Menengah Karawitan Indonesia), ITB Jurusan Seni Rupa dan Desain dan Saung Angklung Udjo yang merupakan Angsana Singasana Angklung terbesar di dunia.

Dari banyaknya kesenian yang ada di Kota Bandung terdapat beberapa kesenian yang menjadi ciri khas dari Budaya Sunda yang terdapat di Kota Bandung seperti seni tari, seni wayang golek, seni suara dan alat-alat musik khas Budaya Sunda. Seni tari utama dalam Suku Sunda adalah tari jaipongan, tari merak, dan tari topeng. Tari Jaipong atau Jaipongan sebetulnya merupakan tarian yang sudah modern karena merupakan modifikasi atau pengembangan dari tari tradisional khas Sunda yaitu Ketuk Tilu. Tari Jaipong ini dibawakan dengan iringan musik yang khas pula, yaitu Degung. Musik ini merupakan kumpulan beragam alat musik seperti gendang, gong, saron, kecapi, dan sebagainya.

Selain itu Tanah Sunda terkenal dengan kesenian Wayang Golek. Wayang Golek adalah pementasan sandiwara boneka yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh seorang sutradara merangkap pengisi suara yang disebut Dalang. Seorang Dalang memiliki keahlian dalam menirukan berbagai suara manusia. Seperti halnya Jaipong, pementasan Wayang Golek diiringi musik Degung lengkap dengan Sindennya. Wayang Golek biasanya dipentaskan pada acara hiburan, pesta pernikahan atau acara lainnya. Waktu pementasannya pun unik, yaitu pada malam hari (biasanya semalam suntuk) dimulai sekitar pukul 20.00 – 21.00 hingga pukul 04.00 pagi. Cerita yang dibawakan berkisar pada pergulatan antara kebaikan dan kejahatan (tokoh baik melawan tokoh jahat).

Cerita wayang yang populer saat ini banyak diilhami oleh budaya Hindu dari India, seperti Ramayana atau Perang Baratayudha. Dalam Wayang Golek, ada 'tokoh' yang sangat dinantikan pementasannya yaitu kelompok yang dinamakan Purnakawan, seperti Dawala dan Cepot. Tokoh-tokoh ini digemari karena mereka merupakan tokoh yang selalu memerankan peran lucu (seperti pelawak) dan sering memancing gelak tawa penonton. Seorang Dalang yang pintar akan memainkan tokoh tersebut dengan variasi yang sangat menarik.

Tanah Sunda juga terkenal dengan seni suara. Dalam memainkan Degung biasanya ada seorang penyanyi yang membawakan lagu-lagu Sunda dengan nada dan alunan yang khas. Penyanyi ini biasanya seorang wanita yang dinamakan Sinden. Tidak sembarangan orang dapat menyanyikan lagu yang dibawakan Sinden karena nada dan ritme-nya cukup sulit untuk ditiru dan dipelajari. Bubuy Bulan Es Lilin Manuk Dadali Tokecang Warung Pojok adalah beberapa dari judul lagu sunda yang terkenal.

## **B. Dinamika Sistem Politik Kota Suwon**

### **1. Pemerintahan Kota Suwon**

Suwon adalah ibu kota dari Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Kota utama dari satu juta penduduk, suwon terkenal di berbagai sisi sejarah Korea, berkembang dari perkampungan kecil dalam masa yang sulit, menjadi kota industri dan kota berbudaya. Suwon terkenal sebagai kota yang memiliki sisa dari Tembok Benteng Hwaseong yang bersejarah di Korea Selatan. Dan Tembok Benteng Hwaseong ini menjadi salah satu tujuan kedatangan turis paling populer di Provinsi Gyeonggi. Suwon juga merupakan kota pusat pendidikan di Korea Selatan, rumah dari 11 universitas. Sebagai pusat industri, Suwon menjadi rumah bagi perusahaan besar Pabrik Elektronik Samsung.

Dulu Suwon merupakan pusat pasar bagi produk pertanian local sekarang Suwon telah menjadi pusat penelitian teknologi dan pengembangan dan pembuatan elektronik di Korea Selatan. Seoul National University College of Agriculture dan Life Sciences dan Kantor pemerintah Pertanian memiliki beberapa lembaga penelitian di sana. Suwon memiliki banyak peninggalan sejarah, sebagian besar dari mereka berasal dari abad ke-18. Yang paling penting adalah Hwasŏng (Hwaseong), benteng yang dibangun oleh Raja Chŏngjo (Jeongjo) pada tahun

1796 yang sebelumnya menutupi seluruh Suwon sebelum terjadi perluasan wilayah di luar tembok. Benteng ini ditetapkan sebagai situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1997. Salah satu acara dari Festival Budaya Hwaseong adalah prosesi pemakaman untuk memperingati kematian Raja Cheongjo yang merupakan acara tahunan di sana.<sup>11</sup>

## **2. Keadaan Geografis Kota Suwon**

Suwon terletak di utara dataran Gyeonggi di 127° bujur timur dan 37° lintang selatan, tepat di sebelah selatan ibukota Korea Selatan, Seoul. Suwon berbatasan dengan Kota Uiwang di utara, Kota Yongin di timur, Kota Hwaseong di sebelah selatan, dan juga berbatasan dengan Kota Ansan di barat. Ada beberapa perbukitan yang mengelilingi Suwon. Bukit tertinggi adalah Bukit Gwanggyosan di utara. Sebagian besar sungai yang melewati Suwon berasal pada Bukit Gwanggyosan atau puncak lain di dekatnya.

Jarak yang dekat antara Kota Suwon dengan Kota Seoul membuat keadaan topografi kedua kota mengalami kemiripan karena terletak di daerah sub-tropis, Kota Suwon memiliki 4 musim yang berbeda musim semi yang hangat, musim panas yang panas dan lembab, musim gugur dingin, dan musim dingin yang dingin dan bersalju. Suhu rata-rata Kota Suwon setiap tahun adalah antara 11-13 ° C (52-55 ° F) dimana suhu di daerah pegunungan di timur laut lebih rendah dan daerah pantai di barat daya yang lebih tinggi. Curah hujan rata-rata Kota Suwon setiap tahun sekitar 1.100 mm (43 in), dengan banyak mengalami hujan. Banyak mengalami hujan di musim panas dan sangat kering selama musim dingin.

Kota Suwon seperti halnya dengan kota-kota lain yang ada di Republik Korea didominasi oleh etnis Korea yang dalam percakapan sehari-hari menggunakan dialek Seoul. Menurut statistik tahun 2006 yang disusun oleh pemerintah Kota Suwon, sekitar 25,3% dari populasi Kota Suwon mengaku tidak memeluk agama tertentu. Sebesar 20% memeluk Agama Kristen dan 52% memeluk Agama Budha. Lalu terdapat Agama Katolik Keuskupan Suwon yang diciptakan pada tahun 1963 oleh Paus Paulus VI yang dipeluk oleh sebagian kecil populasi Kota Suwon.

---

<sup>11</sup> "Suwon" dalam <http://en.wikipedia.org/wiki/Suwon>



**Gambar 2. 2. Peta Geografis kota Suwon<sup>12</sup>**

### **3. Pertumbuhan Demografi Kota Suwon**

Kota Suwon seperti halnya dengan kota-kota lain yang ada di Republik Korea didominasi oleh etnis Korea yang dalam percakapan sehari-hari menggunakan dialek Seoul. Menurut statistik tahun 2006 yang disusun oleh pemerintah Kota Suwon, sekitar 25,3% dari populasi Kota Suwon mengaku tidak memeluk agama tertentu. Sebesar 20% memeluk Agama Kristen dan 52% memeluk Agama Budha. Lalu terdapat Agama Katolik Keuskupan Suwon yang diciptakan pada tahun 1963 oleh Paus Paulus VI yang dipeluk oleh sebagian kecil populasi Kota Suwon.<sup>13</sup>

Kota Suwon merupakan kota yang berbasis industri elektronik. Hal ini disebabkan karena salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia yaitu Samsung Elektronik bermarkas di Kota Suwon. Sehingga hal ini juga menyebabkan banyak penduduk Kota Suwon merupakan buruh atau karyawan yang bekerja di perusahaan atau anak perusahaan Samsung Elektronik.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Map\\_Suwon-si.png](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Map_Suwon-si.png)

<sup>13</sup> “Gyeonggi Province”, dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Gyeonggi\\_Province](http://en.wikipedia.org/wiki/Gyeonggi_Province), diakses pada 17 Februari 2016

<sup>14</sup> “Global City Suwon”, dalam [http://martinprosperity.org/global-cities/Global-Cities\\_Suwon.pdf](http://martinprosperity.org/global-cities/Global-Cities_Suwon.pdf), diakses pada 17 Februari 2016



#### **4. Dinamika Ekonomi Kota Suwon**

Suwon adalah kota satelit dari ibukota Seoul. Meskipun dengan jumlah penduduk 1,1 juta, Suwon merupakan kota terbesar kedua di Korea Selatan. Seperti kota-kota satelit lain di dunia, Suwon berhasil membangun ekonomi yang sukses sehingga dapat membantu melayani kebutuhan dari daerah-daerah disekitarnya. Suwon juga telah menjadi pusat transportasi bagi daerah di selatan Seoul serta menjadi pusat manufaktur yang mengkhususkan diri dalam teknologi dan industri berat. Sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1997, Suwon telah diupayakan untuk dibangun menjadi lebih fleksibel, dan dengan ekonomi berbasis teknologi yang dapat berkembang dan memberi dorongan pada ranah kewirausahaan kecil dan menyambut bakat datang dari seluruh dunia. Hal ini membuat Suwon menjadi fokus kepada investasi tingkat tinggi dan inovasi pendidikan.<sup>15</sup>

Suwon mempunyai potensi tinggi dalam bidang industri. Suwon sendiri merupakan “Rumah” dari Samsung Electronic, perusahaan multinasional Korea Selatan yang bergerak di bidang elektronik dan teknologi informasi. S.K Chemical yang juga bermarkas di Suwon merupakan salah satu perusahaan kimia terkemuka di Korea. Perusahaan kimia ini mempunyai visi mewujudkan masa depan yang harmonis antara manusia dan alam dengan mengembangkan produk kimia yang ramah lingkungan untuk membuat hidup aman dan sehat berdasarkan kemampuan teknis yang mutakhir. Setiap tahunnya S.K Chemical menyumbang dana sebesar 200 juta won kepada Pemerintah Kota Suwon untuk dialokasikan kepada sarana penunjang umum, keluarga usia lanjut yang miskin dan panti jompo.

#### **5. Kondisi Pendidikan Di Kota Suwon**

Salah satu keputusan Dewan Nasional Republik Korea tahun 1948 adalah menyusun undang-undang pendidikan. Sehubungan dengan hal ini, maka tujuan pendidikan Korea Selatan adalah untuk menanamkan pada setiap orang rasa Identitas Nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan Nasional, (menyempurnakan kepribadian setiap warga Negara, mengemban cita-cita persaudaraan yang universal mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri

---

<sup>15</sup> “Suwon, South Korea” dalam [https://www.intelligentcommunity.org/index.php?src=gendocs&ref=CommAcc\\_Suwon&link=CommAcc\\_Suwon](https://www.intelligentcommunity.org/index.php?src=gendocs&ref=CommAcc_Suwon&link=CommAcc_Suwon), diakses pada 17 Februari 2016

dan berbuat untuk Negara yang demokratis dan kemakmuran seluruh umat manusia, dan menanamkan sifat patriotisme.<sup>16</sup>

Secara umum sistem pendidikan di Korea Selatan yang juga menjadi rujukan sistem pendidikan Kota Suwon terdiri dari empat jenjang dan sejalan dengan sebutan “Grade” yaitu :

- 1) Sekolah Dasar, grade 1-6 merupakan pendidikan wajib selama 6 tahun bagi anak usia 6 sampai 12 tahun;
- 2) Sekolah Menengah Tingkat Pertama, grade 7-9 merupakan kelanjutan Sekolah Dasar bagi anak usia 12-15 tahun selama 3 tahun pendidikan;
- 3) SLTA, grade 15-18 dengan 2 pilihan yaitu umum dan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan meliputi pertanian, perdagangan, perikanan, dan teknik. Terdapat pula Sekolah Komprehensif yang merupakan gabungan antara sekolah umum dan sekolah kejuruan yang merupakan bekal untuk melanjutkan ke Akademik (*Junior Collage*) atau Universitas (*Senior Collage*);
- 4) Dan Perguruan Tinggi.

Tercatat ada 11 universitas di Suwon dan 2 perguruan tinggi seperti Universitas Sains Sungkyunkwan, Universitas Kyonggi, Universitas Ajou, Universitas Kyunghee, *Dongnam Health Collage*, Universitas Digital Gukje, *Hapdong Theological Seminary*, dan Universitas Khusus Wanita Suwon. Terdapat 2 Perguruan Tinggi Junior, 33 Sekolah Menengah Atas , 37 Sekolah Menengah Pertama, 81 Sekolah Dasar dan 107 Taman Kanak-Kanak di Suwon. Suwon memiliki tiga sekolah yang ditujukan untuk pendidikan khusus, yaitu Institut Jahye, Sekolah Suwon Seokwang dan *Dream Tree Special School*.<sup>17</sup>

Dalam bidang pendidikan Suwon mempunyai tujuan untuk menjadi kota pendidikan bertaraf internasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah Kota Suwon telah menyediakan anggaran pendidikan lokal terbesar di Korea Selatan. Dari tahun 2003 sampai 2009, Suwon menginvestasikan 406,8 miliar won untuk fasilitas baru bagi pelayanan sekolah dasar dan sekolah menengah. Fasilitas

---

<sup>16</sup> Ali Muhtadi, “Studi Komparatif Pendidikan di Jerman dan Di Korea Selatan“dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132280878/12.%20Studi%20komparatif%20sistem%20pddkn%20di%20Jerman%20dan%20korea%20selatan.pdf>., Diakses pada 17 Februari 2016

<sup>17</sup> “Suwon”, *Loc. Cit*

baru tersebut seperti dapur untuk menyiapkan makanan di sekolah, merenovasi perpustakaan dan membuat fasilitas olahraga dan fasilitas budaya yang baru.

Dalam waktu yang sama, Suwon juga memperbanyak jumlah perpustakaan dan jumlah komputer baru untuk publik, dari tiga unit komputer menjadi delapan unit komputer untuk setiap perpustakaan. Lebih dari lima juta orang mengunjungi perpustakaan pada tahun 2009, naik dari 2,2 juta pada tahun 2003. Investasi juga telah mengalir ke proyek-proyek khusus yang dirancang untuk mengatasi hambatan bagi kemajuan Korea Selatan sebagai negara dengan ekonomi kelas dunia. Kurangnya kefasihan dalam bahasa lain, terutama bahasa Inggris semakin dianggap sebagai penghalang untuk pertumbuhan internasional. Beberapa dana pendidikan di tujukan untuk 43 Sekolah Dasar agar memungkinkan untuk memperkerjakan guru bahasa dari negara-negara Berbahasa Inggris.<sup>18</sup>

Pada tahun 2006 Suwon membuka *Happy Suwon English Village* untuk menyediakan lingkungan belajar bahasa Inggris yang intensif untuk 7.300 siswa SD per tahun. Lalu pada akhir tahun 2010 Suwon membuka *Suwon Village of Foreign Languages* yang menyediakan lingkungan intensif yang sama untuk bahasa asing lainnya, termasuk Bahasa Cina dan Bahasa Jepang. Pada tahun 2007, Suwon mendirikan *Gyeonggi Suwon Foreign School* untuk membuat Kota Suwon menjadi tujuan yang lebih kompetitif dalam pendidikan bagi keluarga asing yang bekerja untuk perusahaan multinasional Korea. Persentase murid dari sekolah tersebut sekolah 75% warga negara asing dan 25% siswa lokal.<sup>19</sup>

Suwon juga telah menciptakan berbagai program dan kegiatan untuk mengarahkan anak-anak muda mereka untuk bekarir di bidang teknologi untuk masa depan. Sejak tahun 2004 Suwon telah mengadakan Festival Informasi dan Ilmu Pengetahuan bersama dengan *National eSports Competition*, *National Intelligent Robot Competition*, Festival Sains Mahasiswa dan *Professional Gamers Exhibition*.

Pada tahun 2009 acara ini dihadiri oleh delegasi dari 17 negara dan juga dihadiri oleh pemuda-pemuda dari Suwon. Kota Suwon dan Provinsi Gyeonggi telah bekerja sama untuk menawarkan lembaga pendidikan bagi yang mampu dan berbakat yang fokus pada pengembangan *Cyberskills*. Suwon juga telah memperkenalkan *Master High School Program*, sebuah program tersertifikasi

---

<sup>18</sup> "Suwon, South Korea" *Loc. Cit*

<sup>19</sup> *ibid*

dalam pembelajaran-pembelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan skill manufaktur yang sangat terampil untuk dipekerjakan dalam Samsung Electronics serta industri lainnya.

Kampus Khusus Perempuan Suwon berfokus pada pelatihan bagi perempuan muda dalam analisis kualitas makanan, pelayanan kesehatan. Universitas Gyeonggi di Suwon telah menyelenggarakan Festival Mentoring Korea yang pertama yang bertujuan untuk membuat jaringan dalam bisnis lokal untuk mendukung, mahasiswa dan alumni pascasarjana. Suwon juga mempunyai program untuk murid yang kurang mampu, *The Suwon Love Scholarship Foundation* memberikan dana sebesar 459 miliar dolar amerika dalam beasiswa, serta hibah penelitian untuk guru yang berkinerja tinggi, dari 2006 sampai 2008. Beasiswa tersebut diberikan kepada siswa kurang mampu, siswa yang berpotensi tinggi dan siswa berkebutuhan khusus untuk membantu membayar biaya pendidikan yang tinggi.<sup>20</sup>

## 6. Kebudayaan Di Kota Suwon

Seperti halnya daerah-daerah lain di Korea Selatan, kebudayaan yang ada di Kota Suwon adalah Kebudayaan Korea. Kota Suwon dibangun ketika masa dinasti Joseon. Kota Suwon dikelilingi oleh *Benteng Hwaseong* (dalam Bahasa Korea berarti “benteng luar biasa”) yang dibangun antara tahun 1794 dan 1796 oleh Raja Jeongjo dari Dinasti Joseon untuk menghormati ayahnya Raja Sado yang dipaksa untuk bunuh diri oleh Raja Yeongjo. Berlokasi 30 kilometer di selatan kota Seoul, benteng ini dibangun dengan tujuan agar menjadi pertahanan bagi Kota Suwon yang saat itu merupakan kota yang menjadi kompleks tempat tinggal khusus kerajaan dan melindungi pusat kota Suwon termasuk Haenggung, kompleks istanan Raja Jeongjo. Benteng ini memiliki 4 gerbang utama, sebuah gerbang air, 4 gerbang rahasia, dan sebuah menara suar. UNESCO memasukkan benteng ini ke dalam daftar Warisan Dunia pada tahun 1997.<sup>21</sup>

Dalam sejarah, Suwon yang dibangun Pada masa Dinasti Joseon, dimana kesenian lukisan berkembang pesat. Seni lukis awal Joseon dipengaruhi oleh cara melukis gaya Cina, namun pada masa-masa berikutnya, para seniman Joseon

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> “Benteng Hwaseong” dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Benteng\\_Hwaseong](http://id.wikipedia.org/wiki/Benteng_Hwaseong), diakses pada 17 Februari 2016

mulai mengembangkan gaya mereka tersendiri. Para pelukis di kantor pelukis pemerintah (*dohwaseo*), melukis dalam berbagai jenis tema, mulaidari bunga, tanaman, burung, potret diri, kehidupan sehari-hari dan hewan. Beberapa pelukis Joseon yang terbesar adalah Kim Hong-do dan Jeong Seon.<sup>22</sup>

Musik tradisional hanya dibina di dalam istana kerajaan dan kuil-kuil Konfusius dan hanya bangsawan yang bisa menikmati musik tradisional yang dipentaskan oleh para musisi dan penari istana yang eksklusif. Seni arsitektur terlihat dari konstruksi bangunan-bangunan istana dan pendopo yang diwarnai secara meriah dengan teknik *dancheong*. Sebagian besar arsitektur Joseon musnah terbakar oleh invasi Jepang di akhir abad ke-16. Beberapa sisa bangunan yang selamat adalah Namdaemun dan Dongdaemun. Pada akhir periode Joseon, budaya barat dan Jepang mulai masuk dan mempengaruhi kesenian Korea.<sup>23</sup>

### C. Sister City

konsep Kota Bersaudara (Sister City) adalah penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan untuk menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk. Jaringan kerjasama ini dilakukan atas dasar kepentingan pengelolaan kota dan kepentingan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Istilah lain dari kota Bersaudara (sister city) adalah kota kembar (*twinning city*), kota bersahabat (*friendship city*) dan kota mitra (*partner towns*). Konsep kota kembar (*twinning city*) dimulai di Eropa sesudah perang dunia II dengan maksud menciptakan saling pengertian antara penduduk kota yang berbeda dan mempromosikan proyek lintas batas untuk kemakmuran bersama. Sedangkan menurut Organisasi Sister City International, Sister City merupakan program kerjasama antar Daerah, Kota atau suatu tempat dengan kedudukan Pemerintah pada suatu Negara dengan Daerah lain yang sama kedudukannya di luar negeri yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik yang sama yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang.<sup>24</sup>

Terdapat perbedaan-perbedaan dalam penyebutan dan pemaknaan istilah sister city di beberapa negara didunia, sebut saja Moskow (Russia) yang hanya menyanggah istilah sister city dengan kota-kota bekas negara-negara pecahan Uni

---

<sup>22</sup> “Kesenian Korea” dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Kesenian\\_Korea](http://id.wikipedia.org/wiki/Kesenian_Korea), diakses pada 17 Februari 2016

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> <http://www.sister-cities.org/about-sister-cities-international> diakses pada tanggal 17 Februari 2016

Soviet. Hal ini menurut negara-negara tersebut, terminologi sister city hanya boleh dipergunakan untuk kerjasama antar dua kota yang sebelumnya memiliki hubungan darah (heritage) atau hubungan emosional yang kuat. Sehingga istilah lain yang diberlakukan selain istilah sister city adalah partnership city, friendship city, twin cities, jumelage, partnertstald. Terkhusus menyangkut penamaan dan penggunaan istilah sister city di Indonesia oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD resmi menggunakan istilah sister city dan sister province dalam menyebut bentuk-bentuk kerjasama antar kota-kota di Indonesia baik itu dalam ranah lokal maupun internasional. Istilah tersebut resmi dikeluarkan oleh kementerian terkait yakni Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan kedepannya. Disisi lain, hal tersebut menjadi simbol, kontrol dan pengawasan dibawah kendali Pemerintah Pusat yang memantau kerjasama-kerjasama Internasional yang dilakukan daerah-daerah di Indonesia.

Kerjasama sister city di Indonesia mulai dirintis pertama kalinya seiring berkembangnya konsep sister city di Amerika Serikat pada decade 1960-an. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Piagam Persaudaraan pada tanggal 2 Juni 1960 antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Braunschweig (Jerman). Dimana hal ini menjadi titik tolak munculnya berbagai Perjanjian Kerjasama sister city diberbagai kota-kota di Indonesia dengan kota-kota diberbagai negara didunia. Munculnya Kota Bandung sebagai Kota perintis dimulainya kerjasama internasional sister city di Indonesia, menjadikan kota-kota lain di Indonesia termotivasi untuk ikut ambil bagian dalam menjalin kerjasama internasional dengan kota-kota lain di dunia. Dengan keikutsertaan kota-kota lain ditiap-tiap provinsi menambah daftar panjang kerjasama internasional yang dilakukan oleh tiap-tiap pemerintah kota/daerah serta mengisi daftar perjanjian internasional dalam treaty room Departemen Luar Negeri.

Dilihat dari dinamika di Indonesia, Permendagri Nomor 1 tahun 1992, disebutkan bahwa hubungan kerjasama sister city adalah hubungan kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antara pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota administratif dengan kota setingkat di luar negeri. Hubungan kerjasama dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, konstruksi biaya masing-

masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang dikerjasamakan.

Kota kembar atau *Sister city* adalah hubungan kerjasama “kota bersaudara” yang dilaksanakan antara Pemerintah Daerah tingkat II, Pemerintah kota administratif, dengan pemerintah setingkat di luar negeri.<sup>25</sup>

Kota kembar pertama mulai dijalin pada tahun 1836 di Jerman. Tahun 1905 terjalin hubungan antara kota Keighley, West Yorkshire di Inggris dengan kota Suresnes dan Puteaux di Perancis. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi. Hubungan kota bersaudara sangat bermanfaat bagi pendidikan (pertukaran pelajar/mahasiswa) dan kerjasama budaya serta ekonomi dan perdagangan. Perkembangan pembangunan dan kepentingan dari masing-masing kota yang menjalin hubungan kerjasama kota bersaudara, saat ini semakin berkembang, terutama menyangkut hal yang menjadi kepentingan bersama seperti isu lingkungan (environmental) dan energi.

Adapun tahapan dalam proses hubungan kerjasama sister city adalah yang *pertama*, bahwa kerjasama tersebut dipererat dengan penandatanganan perjanjian formal yang dikenal dengan MoU, dimana dilakukan oleh pimpinan kota atau pejabat setempat yang ditunjuk. *Kedua*, perjanjian kerjasama yang ditandatangani tersebut dalam jangka waktu yang tidak terbatas. *Ketiga*, oleh karena perjanjian tersebut sedang berjalan dan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, rencana kerja dengan beberapa aspek yang telah disepakati harus disebarluaskan. *Keempat*, peran serta pejabat atau pimpinan kota sangat penting, tetapi perlu juga ditunjang dengan partisipasi masyarakat. Terakhir, kerjasama sister city ini akan membawa dampak besar terhadap berbagai perubahan yang positif, sehingga harus menjadi karakter suatu negara sehingga aparat pemerintahan bersungguh-sungguh dan memiliki andil besar dalam kerjasama tersebut.<sup>26</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 193/1652/PUOD/1993 tertanggal 26 April 1993, pembentukan hubungan kerjasama Sister Province dan Sister City harus didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Sidik Jatmika, 2001, Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal. 107.

<sup>26</sup> Rolf D. Cremer, Anne De Bruin and Ann Dupuis, “International Sister Cities Bridging The Global-Local Divide”, *American Journal of Economic and Sociology*, Vol. 60, No. 1, page 381. Dalam tesis Ika Ariani Kartini, 2012, Penerapan prinsip public good governance dalam hubungan internasional melalui perjanjian sister city (studi kasus sister city kota Bandung), Magister Ilmu Hukum, UGM, hal. 14.

1. Adanya kesamaan kedudukan atas status administrasi,
2. Adanya kesamaan besaran dan fungsi,
3. Adanya kesamaan karakteristik,
4. Adanya kesamaan permasalahan,
5. Adanya ilmu dan teknologi yang dapat dialihkan,
6. Adanya komplementaritas antara kedua belah pihak dalam bidang ekonomi, sehingga dapat menimbulkan aliran barang antara kedua belah pihak.

Menurut Donal Bell Souder & Shanna Bredel dalam *A Study of Sister City Relations*, bidang yang meliputi Kerjasama *Sister City* terbagi menjadi:

1. Budaya, dalam konteks kerjasama budaya ditujukan untuk memahami keanekaragaman budaya yang berbeda sehingga dapat terjalinnya pemahaman mengenai latar belakang budaya, sehingga dapat meningkatkan kerjasama yang lebih mendalam antar Kota dalam hubungan internasional, yang biasanya melibatkan unsur seni musik, pertunjukan budaya, dan hal lainnya yang menyangkut kebudayaan
2. Akademik, dalam bidang akademik biasanya melibatkan pengiriman duta/ delegasi dari suatu Kota terhadap Kota lainnya yang ditunjukkan untuk mempromosikan dan mempelajari budaya lain, untuk mempererat hubungan yang lebih mendalam
3. Pertukaran informasi, dalam hal ini ditunjukkan untuk menanggulangi suatu kesamaan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat terselesaikan dan pengembangan hal ini dapat ditunjukkan untuk pembangunan Kota yang lebih baik
4. Ekonomi, merupakan bidang yang terpenting dalam kerjasama *Sister City*, hal ini berlandaskan pada tujuan peningkatan perdagangan antar Kota, sehingga konteks kerjasama terjalin lebih mendalam.

Lahirnya kebijakan kerjasama internasional antar kota diberbagai negara didunia yang dalam hal ini salah satunya diistilahkan dengan istilah *Sister City* yang dilakukan oleh kedua pemerintah kota tersebut. Aspek historis dari berlangsungnya hubungan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah adalah berawal dari lahirnya *Municipal International Cooperation (MIC)*.<sup>27</sup>

Menurut Asosiasi Pemerintah Daerah Belanda bahwa MIC adalah suatu hubungan kerjasama antara dua atau lebih komunitas. Dimana setidaknya ada satu dari pelaku utamanya adalah pemerintah kota, distrik, provinsi dan negara bagian.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> “Perspektif Hukum dan Ekonomi atas Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah”, Jurnal Hukum Internasional, Vol 6, No.2, 2009, Hal.241.

<sup>28</sup> *Ibid* Hal 241



Terkhusus menyangkut penamaan dan penggunaan istilah sister city di Indonesia oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD resmi menggunakan istilah sister city dan sister province dalam menyebut bentuk-bentuk kerjasama antar kota-kota di Indonesia baik itu dalam ranah lokal maupun internasional. Istilah tersebut resmi dikeluarkan oleh kementerian terkait yakni Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Kemendagri Dalam Negeri untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan kedepannya. Disisi lain, hal tersebut menjadi simbol, kontrol dan pengawasan dibawah kendali Pemerintah Pusat yang memantau kerjasama-kerjasama Internasional yang dilakukan daerah-daerah di Indonesia.

#### **D. Pembentukan Sister City Kota Bandung**

Pada awalnya, program sister city ini biasa dilakukan antar kota di negara maju di Amerika Utara atau Eropa, sehingga ada kesetaraan kondisi sosial dan ekonomi, antara kota yang bekerjasama. Meskipun akhirnya muncul sister city antara kota negara maju dengan kota negara berkembang, atau kota negara berkembang dengan kota negara berkembang. Keuntungan yang didapatkan dengan melaksanakan perjanjian sister city antara lain:<sup>29</sup>

1. Kesempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan.
2. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah kota, masyarakat dan swasta.
3. Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak.
4. Kesempatan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah.

Meski demikian, hubungan kerjasama sister city juga menimbulkan beberapa faktor negatif, diantaranya terjadinya beban keuangan negara atau daerah, menunggu fasilitasi pihak pemerintah, munculnya ketidaksetaraan, bidang kerjasama yang kurang seimbang dari aspek permodalan sehingga menguntungkan salah satu pihak saja.

---

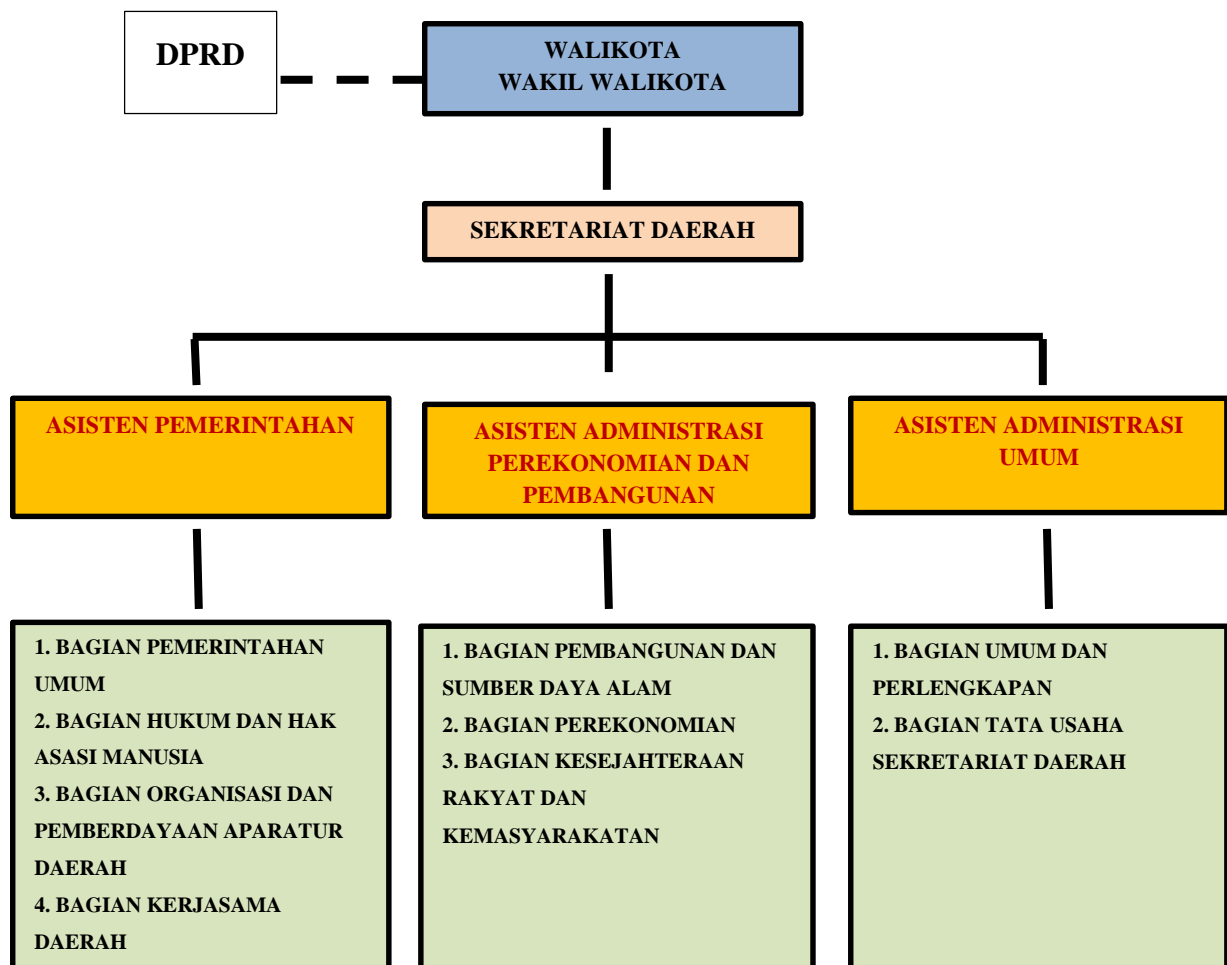
<sup>29</sup> Andi Oetomo, (Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Kebijakan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung), Bulletin Penataan Ruang. Hal. 1. Dalam Tesis Ika Ariani Kartini, 2012, Penerapan prinsip public good governance dalam hubungan internasional melalui perjanjian sister city (studi kasus sister city kota Bandung), Magister Ilmu Hukum, UGM, hal. 14

Dalam rangka pelaksanaan amanat MPR45, telah diundangkan dua undang-undang, masing-masing undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Pembentukan kerjasama sister city atau kota kembar ini telah diatur dalam pasal 5 permendagri Nomor 03 Tahun 2008.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa jika daerah yang hendak mengadakan kerjasama sister city dengan daerah lain baik internal maupun lintas negara, maka harus memperhatikan syarat similarities. Sebagaimana tercantum dalam diktum konsiderannya, salah satu pertimbangan diadakannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 adalah dalam rangka menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global. Selain itu, dalam pasal 4 peraturan menteri dalam negeri nomor 03 Tahun 2008 diberikan penegasan bahwa sebelum menjalin sebuah kerjasama sister city, pemerintah daerah setempat harus memenuhi berbagai persyaratan:

1. Hubungan diplomatik. Daerah yang diajak kerjasama harus memiliki hubungan diplomatik dengan indonesia
2. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri. Pertemuan antar perwakilan daerah tidak bersifat diplomatik tetapi hanya berupa pendelegasian. Merupakan urusan pemerintah daerah
3. Segala permasalahan dan perjanjian yang dilakukan selama program *sister city* menjadi tanggung jawab setiap pemerintah daerah yang terlibat
4. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri
5. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan. Kerjasama sister city tidak boleh dilaksanakan secara insidental.

**Tabel 2. 1. Struktur Kelembagaan Pemerintah Kota Bandung Dalam Kerjasama Luar Negeri**



Peran pemerintah kota dalam kerjasama *Sister city* antara lain :<sup>30</sup>

- a) DPRD : - Monitoring kegiatan-kegiatan *Sister city*
  - Persetujuan pembentukan kerjasama dan anggaran pemkot
  - Melakukan kegiatan kerjasama *Sister city* dengan legislatif kota mitra

Peran stakeholder lain yaitu :

- a) LSM : - Melakukan kegiatan kerjasama di bidang lingkungan
  - Mengadvokasi kebutuhan masyarakat
  - Terlibat dalam sosialisasi program lingkungan ke masyarakat
- b) Pengusaha: Melakukan kegiatan kerjasama di bidang perdagangan, bisnis, dan industri

Oleh karena itu dipandang perlu adanya menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada

<sup>30</sup> Portal.bandung.go.id

daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu merupakan hubungannya dengan *Sister city*, karena dianggap lebih menguntungkan maka *sister city* ini dianggap bisa menambah potensi daerah masing-masing di Indonesia.

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Jawa Barat. Bandung mempunyai beberapa sebutan seperti “Paris Van Java” karena hawanya yang dingin dengan bangunan-bangunan masa kolonial yang menyerupai kota-kota di Eropa, “Kota Kembang” karena di Kota Bandung banyak ditemui taman bunga, meskipun ada literatur yang menyebutkan, bahwa sebutan kota kembang tersebut lebih dikarenakan oleh kecantikan para gadis di Kota Bandung. Selain itu, Kota Bandung dikenal juga dengan kota yang penuh dengan kenangan sejarah perjuangan rakyat Indonesia pada umumnya, beberapa monumen telah didirikan dalam memperingati beberapa peristiwa sejarah tersebut, diantaranya Monumen Perjuangan Jawa Barat, Monumen Bandung Lautan Api, Monumen Penjara Banceuy, Monumen Kereta Api dan Taman Makam Pahlawan Cikutra.

Kebudayaan adalah salah satu hal yang paling menarik dari sebuah Negara, dengan adanya budaya seseorang dapat lebih mengenal segala hal yang mendasar dari sebuah Negara. Diharapkan dengan diperkenalkannya kebudayaan Negara lain dan juga dapat mempererat kerjasama antar Negara.

Pada awalnya kerjasama *sister city/province* adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi/Kota di satu negara dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kota di luar negeri yang berorientasi pada upaya menumbuhkembangkan hubungan persahabatan dan saling pengertian antar bangsa-bangsa yang berbeda. Namun kini bergeser ke arah bentuk kerjasama konkret dan saling menguntungkan.

Kerjasama *sister city/province* dipandang sangat membantu bagi fungsi-fungsi pemerintahan dalam membina Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk turut secara aktif dalam pembangunan. Kerjasama *sister city/sister province* dengan mitranya di luar negeri diarahkan untuk penyelenggaraan hubungan dan kerjasama bermanfaat dan saling menguntungkan. Dalam pelaksanaannya, kerjasamanya, kerjasama *sister city/sister province* harus berpedoman pada peraturan dan tertib administrasi sesuai

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Luar Negeri juga harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam hal keuangan, kelembagaan, dan ketersediaan SDM aparatur serta sesuai dengan potensi dan kebijakan pihak mitra asing.<sup>31</sup>

Untuk melakukan kerjasama *sister city*, kota Bandung telah mempunyai tata cara/prosedurnya sendiri, yaitu sebagai berikut:

1) Penjajagan

Penjajagan dilakukan dengan saling tukar menukar potensi yang dimiliki daerah antara kedua belah pihak. Pertukaran ini dapat memanfaatkan kantor perwakilan Negara asing di Indonesia atau kantor perwakilan RI di luar negeri.

2) Penandatanganan LoI (*Letter of Intent*)

Apabila keinginan untuk bekerjasama mendapat sambutan positif dari masing-masing pihak, maka antara kedua belah pihak dapat menandatangani *Letter of Intent* (LoI)

3) Penyusunan Rencana Kerjasama

Setelah ditandatanganinya LoI, pemerintah daerah segera menyusun Rencana Kerjasama atau *Term of Reference* dan *Plan of Action* yang menggambarkan maksud dan tujuan kerjasama serta manfaat yang diperoleh.

4) Persetujuan DPRD

Rencana kerjasama, *plan of action disertai LoI* yang sudah ditandatangani kedua pihak kemudian diajukan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

5) Permintaan Fasilitasi Pemerintah

Setelah adanya persetujuan DPRD, pemerintah daerah mengajukan surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk minta fasilitasi kerjasama. Surat permohonan ini dijadikan syarat untuk menentukan pembahasan *draft MoU* dengan melibatkan Kemenlu, Setneg RI, Kemendagri dan Kementrian/'Lembaga terkait lainnya.

6) Penyusunan Draft MoU (*Memorandum of Understanding*)

MoU untuk kerjasama *sister city/sister province* tergolong dokumen perjanjian Internasional, sehingga penyusunannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu sebagai ahli Hukum Internasional. *Draft* yang telah disusun Kemenlu tersebut kemudian dibahas pada forum interkem yang

---

<sup>31</sup> Harunata, Basilio Dias Araujo, dkk. "Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Sister City/ Sister Province". (Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2011). Hal. 1.

terdiri dari Kemenlu, Setneg RI, Kemendagri, dan kementerian/lembaga terkait lainnya. Forum interkem kemudian membubuhkan paraf pada draft MoU yang telah dibahas. *Draft* MoU hasil rapat interkem disampaikan oleh kKementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Luar Negeri untuk diteruskan ke kantor perwakilan RI di luar negeri untuk dikomunikasikan dengan calon *sister city/sister province* untuk mendapatkan tanggapan.

#### 7) Penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*)

Draft MoU yang telah mendapatkan persetujuan mitra kerjasama luar negeri, oleh Kementerian Luar Negeri kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi yang bersangkutan untuk proses usulan *full Power*. Pemerintah provinsi/kota selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan surat kuasa (*full power*) kepada Menteri Luar Negeri dengan melampirkan draft MoU yang telah diparaf.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri mengirim surat rekomendasi kepada Menteri Luar Negeri untuk penerbitan surat kuasa (Full Power) penandatanganan MoU kepada pejabat yang namanya tertera dalam Full Power sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Setelah surat kuasa terbit, pejabat pemerintah provinsi atau pemerintah kota mitra kerjasama di luar negeri. Asli MoU yang sudah ditandatangani dikirim kepada Kementerian Luar Negeri untuk disimpan sebagai dokumen Negara. Kementerian Luar Negeri menerbitkan salinan resmi yang sah sebagai pegangan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri.

#### 8) Pelaksanaan Kerjasama

Setelah MoU ditandatangani, maka dokumen kerjasama tersebut mengikat kedua pihak dan program-program yang disepakati dapat mulai dilaksanakan. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota membentuk tim kerjasama sebagai pelaksanaan harian dari hasil kegiatan yang disepakati. Pemerintah provinsi atau kota dapat mengalokasikan dana yang mungkin timbul dalam kerjasama tersebut melalui APBD dan sumber-sumber lain yang sah.

#### 9) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga lain terkait akan melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian dan

hasil kerjasama sesuai instrumen Monitoring dan Evaluasi yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### 10) Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintah Provinsi atau pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan secara periodic kepada Kementerian Dalam Negeri tentang Pelaksanaan program kerjasama tersebut. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk pertimbangan rencana kerjasama sister city selanjutnya dengan mitra lain provinsi atau kota di luar negeri.

Pembentukan kerjasama sister city Kota Bandung dan Kota Suwon ini berawal dari Inisiatif Pemerintahan Kota Suwon yang berkeinginan mengadakan Mitra Kota dengan Kotamadya Bandung, yang disampaikan melalui kedutaan besar RI di Seoul dan Dirjen HELN Departemen Luar Negeri untuk disampaikan kepada Menteri Luar Negeri untuk disampaikan kepada Menteri Luar Negeri RI, kerjasama tersebut mencakup Bidang Ekonomi, Perdagangan, Pariwisata, Investasi Iptek, Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan, Pemuda dan Olahraga.

Pemerintah Kota Bandung dan KADIN mempelajari keinginan Kota Suwon dan mengadakan beberapa peninjauan dengan cara saling berkunjung antara pejabat pemerintah kedua kota, maka pada tanggal 5 Agustus 1996, kedua kota menandatangani Letter Of Intent (Naskah Pernyataan Keinginan Bermitra Kota).

Selanjutnya, setelah mempelajari prosedur kerjasama, dilaksanakan penandatanganan MoU oleh Walikota Bandung, Wahyu Hamijaya, dan Walikota Suwon, Sim Jae Douk, dan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antar KADIN pada tanggal 25 Agustus 1997 di Kota Suwon, Republik Korea. Kerjasama meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesenian dan olahraga.

Kerjasama bidang ekonomi, antara KADIN kota Bandung dengan Kota Suwon, meskipun belum optimal, menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini dibuktikan dengan intensitas hubungan dan bantuan dana dari kadin Suwon kepada kadin Kota Bandung dalam pembangunan gedung Kadin Kota Bandung.

Terkait dengan harapan dan keinginan walikota dalam meningkatkan prestasi persepakbolaan di kota Bandung, khususnya keberadaan Persib, memungkinkan adanya bantuan dan kerjasama dengan atlet sepakbola Kota Suwon.<sup>32</sup>

Pemerintah Kota Bandung mempelajari keinginan pemerintah Kota Suwon dan mengadakan beberapa peninjauan dengan cara saling berkunjung antara pejabat pemerintah kedua kota untuk mengetahui apakah kedua kota saling berminat dan Kota Bandung memberikan tanggapan positif terhadap ajakan dari Kota Suwon. Lalu kedua kota pada tanggal 5 Agustus 1996 menandatangani Letter of Intent di Kota Suwon sebagai tanda kesepakatan awal keinginan bermitra kota yang sesuai dengan prosedur/mechanisme pelaksanaan Kerjasama Kota/Provinsi Kembar poin c sampai dengan poin f. Sebagai tindak lanjut dari LoI dilakukan penandatangan MoU oleh Walikota Bandung, Wahyu Hamijaya dan Walikota Kota Suwon, Sim Jae Douk pada tanggal 25 Agustus 1997 di Kota Suwon dengan meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

1. Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Industri, dan Pariwisata;
2. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Administrasi;
3. Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga

#### **E. Fokus Bidang Kerjasama Sister City Bandung dan Suwon**

Hubungan kerjasama sister city antar dua kota yang bekerjasama tidak terlepas dari tujuan pembangunan ekonomi. Dimana sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara pihak yang berkepentingan dengan tujuan pertukaran kegiatan bisnis dan dengan pihak yang berkepentingan pertukaran pendidikan maupun pertukaran budaya. Secara lebih rinci bidang kerjasama Pemerintah Kota Bandung dengan Kota Suwon.

Pada tanggal 25 Agustus 1997, Walikota Bandung Wahyu Hamijaya dan Walikota Suwon Sim Jae Douk melakukan penandatangan MoU kerjasama Bandung dan Suwon yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

1. Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Industri, dan Pariwisata;
2. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Administrasi;
3. Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga

---

<sup>32</sup> Buku Sister City Bandung. Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013



Semenjak penandatanganan MoU pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2013, kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kerangka Sister City Bandung-Suwon meliputi bidang :

1. Ekonomi Perdagangan

Bidang ekonomi perdagangan merupakan salah satu upaya dari Bagian Hubungan Kerjasama dan pengurus Asosiasi Kota Bersaudara kota Medan dalam mendukung program Pemerintah Kota Medan untuk promosi Kota Medan sebagai salah satu tujuan perdagangan dan investasi mitra kerjasama Kota Bersaudara.

Kerjasama yang telah dilaksanakan Bandung dan Suwon dalam bidang ekonomi perdagangan diantaranya adalah

- a. Delegasi Bisnis Kota Suwon telah mengadakan pembicaraan dengan KADIN kota Bandung pada Bulan Juni 2000, dimana pada saat itu pengusaha Kota Bandung telah memberikan informasi tentang kegiatan bisnis dan ekonomi di Kota Bandung
  - b. KADIN kota Bandung bekerjasama dengan KADIN Kota Suwon untuk membuka pusat informasi perdagangan, ekonomi, dan industri di Kota Suwon
  - c. Transaksi dagang antara pengusaha Kota Bandung dengan pengusaha Kota Suwon serta promosi produk-produk Kota Bandung
  - d. Pertemuan bisnis antara pengusaha kota Bandung dengan pengusaha Kota Suwon di Kota Bandung yang difasilitasi oleh KADIN Kota Bandung
2. Pemuda dan olahraga
- a. Kompetisi Persahabatan Sepak Bola Junior antara kedua kota
  - b. Pada tahun 2004 Kota Suwon telah mengirimkan delegasinya ke Kota Bandung sebanyak 2 kali, di mana dalam kunjungan tersebut telah dibicarakan beberapa rencana dan langkah ke depan untuk merealisasikan berbagai program yang telah lama direncanakan oleh pihak kota Bandung dan Kota Suwon
  - c. Studi banding antar pegawai pemerintah untuk mempelajari manajemen pemerintahan
  - d. Pengiriman koki Kota Bandung untuk mengikuti 'Food Festival' pada Festival Hwaseong di Kota Suwon
  - e. Pertukaran pemuda Suwon Youth Foundation tahun 2011 dan 2012

- f. Mengirimkan tim kesenian kota Bandung untuk berpartisipasi pada festival Hwaseong 2013

### 3. Pendidikan

- a. Pada tahun 2010 Universitas Maranatha Bandung dan Universitas Hanshin Suwon sepakat untuk menjalin kerjasama antar universitas
- b. Bantuan pembangunan MCK di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cinambo dari Kyonggi University dan bantuan alat-alat tulis tahun 2012
- c. Program Kelas Bahasa Korea di Universitas Maranatha sejak tahun 2011
- d. Pembangunan fasilitas Pendidikan Anak Usia dini di kelurahan Sukamulya pada tahun 2013 dan 2014 oleh Universitas Kyonggi
- e. Penjajakan kerjasama antara Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dengan Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Suwon

### 4) Kebudayaan

Pembangunan monumen Sister City Bandung-Suwon di kota Suwon<sup>33</sup>

## **F. Kasus-kasus Interdependensi Kompleks antara Kota Bandung dan kota Suwon**

Beberapa contoh kasus dalam kerjasama Sister City Kota Bandung dan Suwon yang berkaitan dengan teori Interdependensi Kompleks diantaranya adalah :

1. Pada bidang pendidikan, pada tahun 2011, delegasi Kota Bandung mengunjungi perpustakaan Kota Suwon sekaligus mewawancarai kepala perpustakaan Kota Suwon. Ini sebagai pemenuhan kewajiban pemerintah pada pasal 7 UU No 43 tahun 2007 tentang perpustakaan yakni pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan sistem Nasional perpustakaan sebagai upaya pendukung sistem pendidikan nasional. Kesempatan ini digunakan untuk mendapatkan masukan-masukan positif mengenai manajemen pengelolaan pengarsipan dan manajemen pengelolaan perpustakaan.

Dan pada tahun yang sama, di bidang pendidikan, dalam rangka mempererat persahabatan yang terjalin antara kota Bandung dan Kota Suwon, dilakukan pertukaran pemuda pada *Suwon Youth Foundation*, yang mana delegasi dari Suwon membuka/ mengadakan kelas Korea dengan Hansamo. Ketergantungan Bandung terhadap Suwon merupakan kunci membentuk pendidikan Nasional yang makin baik. Dan ketergantungan Suwon terhadap Bandung yaitu

---

<sup>33</sup> Buku Sister City Bandung. Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013

menambah pendidikan dalam hal bahasa Korea di Bandung sehingga adanya penarikan tenaga kerja bahasa Suwon di Bandung.

2. Pada bidang kebudayaan Tahun 2013, Kota Suwon mengirimkan 15 orang pemuda sukarelawan ke kota Bandung melalui program dalam rangka memperkenalkan budaya Korea, dan sebelumnya pada tahun 2011 diadakan *Suwon Youth Foundation* yang mana Bandung mengirimkan beberapa delegasinya untuk memperkenalkan budaya Bandung. Dalam hal ini antara kedua kota saling mempromosikan kebudayaan masing-masing kepada warga masyarakatnya untuk meningkatkan rasa ketertarikan masyarakat kota agar mengunjungi Kota Bandung maupun Kota Suwon. Sehingga dalam hal tersebut juga dapat mempromosikan kesenian, kebudayaan dan pendapatan dalam pariwisata juga turut meningkat. Ketergantungan Suwon adalah memperkenalkan kebudayaan mereka terhadap Bandung sehingga akan banyak masyarakat Bandung makin kenal terhadap kesenian dan kebudayaan Suwon yang mana akan menarik masyarakat Kota Bandung yang dominan menyukai kebudayaan Suwon mengunjungi kota Suwon. Begitu juga sebaliknya dengan Bandung. Namun ketika kerjasama mereka sedikit renggang, itu tidak akan menurunkan potensi dari sumber daya kebudayaan masing-masing kota, karena Kota Bandung dan Suwon telah memiliki keunggulan budayanya sendiri.
3. Pada bidang perekonomian, pemerintah kota Bandung bekerjasama dengan pemerintah Suwon dalam hal meningkatkan fasilitas di Bandung seperti pembuatan MCK dan pemberian beberapa fasilitas di Desa Sukamulya. Sedangkan ketergantungan Suwon sendiri terhadap Bandung dalam segi perekonomian adalah Bandung memiliki pangsa pasar yang cukup domain, dan tenaga-tenaga pekerja yang dinilai bayarannya masih cukup terjangkau, karena kita ketahui bahwa di Suwon tenaga kerja di sana sudah cukup mahal sehingga Suwon bisa mendapatkan tenaga kerja dari Bandung yang dapat dibayar dengan harga terjangkau yang akan menguntungkan industri yang berada di Suwon untuk menekan biaya pengeluaran beberapa industri di Suwon.
4. Pada bidang kerjasama dan olahraga, beberapa kali Persib Bandung mengirimkan beberapa delegasinya untuk melakukan pelatihan di Suwon. Walikota Bandung ingin meningkatkan prestasi pesepakbola di kota Bandung, sehingga memungkinkan Bandung bergantung terhadap Suwon dalam bantuan

dan kerjasama dengan atlet sepakbola Kota Suwon. Walikota Suwon juga pernah menjabat sebagai ketua asosiasi sepakbola Suwon selama 14 tahun. Dalam hal kerjasama ini, yang mana Persib termasuk team yang dinanti oleh para penggemar pesepakbola Indonesia sehingga jelas berhubungan dengan brand atau ikon (nama, logo) Persib. Dimana tidak sedikit perusahaan yang mengambil keuntungan dengan menggunakan ikon Persib. Hal lainnya adalah berkaitan dengan sponsor dan juga investor. Dalam hal timbal balik dan ketergantungan, dapat dikatakan Suwon akan mendapatkan keuntungan berbentuk materi, dan juga makin membesarkan Blue Bird Wings apabila melakukan kerjasama dalam melatih Persib.

